

**KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBERDAYAAN
UKM AGRIBISNIS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

Disusun oleh :

DIYAH PUTRI MERDEKAWATI

D0105059

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan

Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing

Drs. Pramono, SU

NIP. 19490407 198003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

1. **Drs. Is Hadri Utomo, M. Si** (.....)
NIP. 19590907 198702 1 001
2. **Drs. Suryatmojo, M. Si** (.....)
NIP. 19530812 198601 1 001
3. **Drs. Pramono, SU** (.....)
NIP. 19490407 198003 1 001

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Dekan, Agustus 2009

Drs. H. Supriyadi SN, SU

NIP. 19530128 198103 1 001

MOTTO

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

(Az-Zumar : 53)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Asy-Insyirah : 5)

Beruntunglah orang yang jika dicoba akan bersabar dan jika memperoleh keberhasilan serta kegembiraan akan bersyukur.

(DR, Aidh Al Qarni)

Hidup itu cuma satu kali, manfaatkanlah untuk hal – hal yang baik.

Nothing imposible in the world.

(Penulis)

Ketika kehidupan memberi seribu alasan untuk menangis, tunjukkan bahwa ada sejuta alasan untuk tersenyum. Nikmati setiap detik waktu dengan bersyukur dan jalani hari dengan keikhlasan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

❖ Papi dan Mami tercinta

Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Maaf hanya karya kecil ini yang baru bisa aku persembahkan. Semoga ada sedikit kebanggaan dihati papi dan mami buat aku.

❖ Kedua saudaraku

Terima kasih atas do'a, semangat dan dukungannya.

❖ Sahabatku

Aisyah, Andin, Heni, Acix thanks for all. Aku tak mungkin bisa menemukan sahabat seperti kalian. Semoga persahabatan ini tak kan lekang oleh waktu walaupun jarak memisahkan kita.

❖ Teman – temanku

Maz_Agunk (my future life??), Cimux, Tomblok (KalTim??boleh tu), Alam (UGM I'm coming), temen – temen eks SMANEGA thanks buat do'a dan semangatnya. Tanpa dukungan kalian aku tak mungkin bisa.

❖ Seluruh Sahabatku AN '05

Wahyu, Sandy, Satria, Sapi Handi, Rian, Ijonk, Lubis Crew, Priska Crew, Fajar Crew, dan seluruh sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu – persatu.

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas ridho dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBERDAYAAN UKM AGRIBISNIS”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Sosial di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Pramono, SU selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Dra. Hj. Lestariningsih, M.Si selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
3. Drs. Sudarto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Drs. H. Supriyadi SN, SU selaku Dekan FISIP, yang telah memberikan legalitas berbagai permohonan ijin guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNS, yang telah mencurahkan ilmunya sehingga insyaallah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Pimpinan dan Seluruh Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang, yang telah membantu memberikan keterangan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2005 yang telah menjadi teman dan sahabat penulis selama ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini walau tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan. Semoga bermanfaat bagi semuanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Agustus 2009

Diyah Putri M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	11
2. Pemberdayaan	33
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	38
4. Agribisnis	41
5. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)	43
F. Kerangka Pemikiran	47
G. Metode Penelitian	49

BAB II DESKRIPSI LOKASI

A. Sekilas Kabupaten Semarang	55
B. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Semarang	56
C. Tugas Pokok dan Fungsi	56
D. Formasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang	75
E. Struktur Organisasi	78

BAB III PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang	
1. Indikator Produktivitas	80
2. Indikator Responsivitas	92
3. Indikator Akuntabilitas	97
B. Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan UKM Agribisnis	100
C. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan UKM Agribisnis	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Usaha Kecil Tahun 2007 dan 2008 Kabupaten Semarang	5
Tabel I.2	Perkembangan Usaha Menengah Tahun 2007 dan 2008 Kabupaten Semarang	5
Tabel I.3	Data Pembinaan dan Pengembangan Bidang Produksi dan Pengolahan Tahun 2008 Kabupaten Semarang	6
Tabel I.4	Data Jumlah UKM Agribisnis Kabupaten Semarang Di Tiap Kecamatan	7
Tabel I.5	Pengelompokan Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja	40
Tabel II.1	Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
Tabel II.2	Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Berdasarkan Tingkat Golongan	76
Tabel II.3	Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel III.1	Data Jumlah UKM Agribisnis Kabupaten Semarang Di Tiap Kecamatan	84
Tabel III.2	Data Omset Bidang Produksi dan Pengolahan Agribisnis Tahun 2008 Kabupaten Semarang	85
Tabel III.3	Data Peserta Pelatihan Manajemen Pemasaran Tahun 2007 dan Tahun 2008	91
Tabel III.4	Jenis Pelatihan dan Penyuluhan UKM Agribisnis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang Tahun 2008	95
Tabel III.5	Matriks Hasil Penelitian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang Dalam Pemberdayaan UKM Agribisnis	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka Pemikiran	48
Gambar I.2	Skema Model Analisis Interaktif	54
Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang	78

ABSTRAK

Diyah Putri Merdekawati, D0105059, **Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Semarang Dalam Pemberdayaan UKM Agribisnis**, Skripsi, Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, 115 halaman.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah UKM di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun. Apalagi semenjak Negara Indonesia tertimpa krisis moneter tahun 1997, pengangguran semakin bertambah, semakin tinggi tingkat kemiskinan serta ketimpangan distribusi pendapatan. UKM merupakan salah satu jalan keluar bagi penanggulangan masalah-masalah tersebut yang langsung mengena pada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Salah satu UKM yang berpotensi untuk terus berkembang di Kabupaten Semarang adalah UKM agribisnis. Akan tetapi UKM agribisnis ini masih menemui beberapa kendala dalam menjalankan usaha mereka. Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang sebagai pemegang wewenang pembinaan UKM berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan UKM di Kabupaten Semarang, khususnya UKM agribisnis agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih mandiri.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam memberdayakan UKM agribisnis. Bagaimana produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan, serta apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisa interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan UKM agribisnis adalah dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan, serta mengikutsertakan UKM-UKM agribisnis tersebut dalam kegiatan pameran. Produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan UMKM sudah cukup baik. Namun, hasil pemberdayaan belum optimal karena belum memenuhi target dari pemerintah. Dalam menjalankan kinerjanya, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjumpai berbagai faktor penghambat seperti terbatasnya sarana prasarana, anggaran, maupun terbatasnya aparat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang itu sendiri. Selain itu ada pula faktor pendukung yaitu antara lain hubungan yang baik dan kekeluargaan antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan pengusaha UKM-UKM, juga bantuan serta kepedulian dari pihak-pihak luar yang mendukung kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis ini sehingga dapat berjalan dengan baik walaupun hasilnya belum optimal.

ABSTRACT

Diyah Putri Merdekawati, D0105059, **Performance On duty Co-Operation and UMKM of Sub-Province Semarang in Enableness of UKM Agribisnis**, Skripsi, Public Administration, FISIP, Sebelas Maret University, Surakarta, 2009, 115 pages.

This background research is overshadowed by growing of amount UKM in Sub-Province Semarang from year to year. More than anything else since Indonesia State borne down upon by a monetary crisis of year 1997, unemployment progressively increase the, excelsior mount the poorness and also lameness of earnings distribution. UKM represent one of the way out to overcome the synchronized direct the problems at society specially middle society downwards. One of UKM which have potency to be continued to to expand in Sub-Province Semarang is UKM agribisnis. However this UKM agribisnis still meet some constraint in running the effort them. For that On duty Co-Operation and UMKM of Sub-Province Semarang as owner of authority of construction UKM is obliged to conduct the enableness UKM in Sub-Province Semarang, specially UKM agribisnis can be continued to expand and become more self-supporting.

Especial target from this research is explicate the performance On duty Co-Operation and UMKM of Sub-Province Semarang in powered of UKM Agribisnis. How productivity, responsivitas, and akuntabilitas which have been executed, and also any kind of supplementary factor and also resistor factor in the activity execution.

This research use the descriptive method qualitative supported by a obtained from interview, observation, and documentation. Data collecting conducted by purposive of sampling and snowball sampling. While technique analyse the data use the analysis interaktif by relying on process reduce the data, data presentation, and conclusion withdrawal.

Performance On duty Co-Operation and UMKM of Sub-Province Semarang in enableness of UKM agribisnis is by performing a training and counselling, and also involve the the UKM-UKM agribisnis in exhibition activity. Produktivity, responsivity, and akuntability On duty Co-Operation and UMKM have good enough. But, result of enableness not yet optimal because not yet fulfilled the goals from government. In running its performance, On duty Co-Operation and UMKM also meet various resistor factor like the limited medium infrastructure, budget, and also the limited government officer from On duty Co-Operation and UMKM itself. Besides there is also supplementary factor that is for example good relation and familiarity between On duty Co-Operation and UMKM with the entrepreneur UKM-UKM, also aid and also caring from outside party supporting activity of this enableness UKM agribisnis is ambulatory so that better although its result not yet optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah pembangunan bagi manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Agar tujuan pembangunan nasional tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas keamanan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, partisipasi politik serta kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Untuk itu pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan melengkapi.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuka mata pemerintah untuk mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang justru selama krisis moneter telah menjadi penyelamat ekonomi nasional, baik sebagai penyumbang devisa maupun sebagai penyerap tenaga kerja, termasuk korban PHK perusahaan besar. Namun demikian, dalam implementasinya,

keberpihakan tersebut masih menghadapi banyak kendala, karena keterbatasan modal kerja dan investasi bagi KUKM dalam mengembangkan usahanya.

Krisis ekonomi juga menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sektor agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional. Ketika sektor lainnya terpuruk dihantam krisis, sektor ini tumbuh berkembang. Dari hasil riset pasar di Indonesia, menyatakan bahwa ada sektor usaha yang akan tetap tumbuh, walaupun Indonesia dalam masa sulit sekalipun, yaitu sektor agribisnis, dalam kaitannya dengan upaya mencerdaskan penduduk dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di dalam negeri maupun ekspor. Hal ini telah dibuktikan oleh sejumlah pengusaha skala kecil sektor agribisnis sejak krisis ekonomi 1997 lalu.

Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan sektor yang penting di semua negara, karena sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan amat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Hampir 50 % dari total tenaga kerja saat ini bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga agribisnis dapat diandalkan sebagai penghasil sekaligus penghemat devisa.

Dalam perekonomian nasional, sumbangan sektor agribisnis cukup besar dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Berdasarkan data statistik terdapat sembilan komoditi yang nilai ekonominya di atas US \$ 1 milyar setiap tahun, yaitu padi, kayu dan kayu olahan, pulp dan kertas, CPO, gula pasir, produk perikanan karet dan pengolahan karet, serta jagung. Kecuali padi dan jagung, komoditi tersebut juga merupakan produk penghasil devisa nasional yang utama selain migas. (www.wikipedia.com).

Keberadaan sumber daya alam Indonesia, sangat mendukung pengembangan agribisnis, khususnya dari ketersediaan lahan yang luas. Dari 1919,9 juta hektar luas daratan Indonesia, seluas 133,7 juta hektar (69,7%) secara fisik mempunyai daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian. Dari lahan tersebut seluas 22,4 juta hektar di antaranya diidentifikasi sebagai lahan yang cocok untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dari lahan yang potensial ditanami tersebut, seluas 91,4 % terdapat di luar Jawa dan hanya 8,6 % di Pulau Jawa. (www.wikipedia.com).

Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta memberikan perimbangan yang baik antara keuangan pusat dan daerah dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuan perekonomian daerah masing – masing, maka UKM dituntut untuk mampu melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengupayakan tindakan – tindakan produktif yang dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya dengan pemberdayaan UKM di masing – masing daerah. Dengan adanya pemberdayaan tersebut dapat membuat UKM untuk lebih baik dan memacu tumbuhnya usaha – usaha lainnya.

Untuk mensukseskan usaha agribisnis nasional, setidaknya ada 3 peran utama yang harus dibina dan diberi kesempatan yang terbuka, yaitu :

- a. Pengembangan sektor usaha agribisnis unggulan

- b. Menumbuhkan kemitraan dan peluang usaha bagi jutaan unit usaha agribisnis di perkotaan dan pedesaan untuk sektor usaha unggulan tersebut.
- c. Membina dan mengembangkan sarana penunjang usaha, termasuk usaha simpan pinjam / perbankan, pedoman studi kelayakan dan konsultan pendamping.

Prospek komoditi agribisnis nasional masih cukup menjanjikan dengan melihat beberapa indikator penting, yaitu :

1. Usia angkatan kerja yang mencapai sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia berpotensi dapat meningkatkan komoditi agribisnis.
2. Jumlah perusahaan skala kecil yang masih sehat masih kurang sekali diberbagai sentra produksi, terutama yang telah memperoleh fasilitas kredit perbankan.
3. Para pengelola agribisnis di Indonesia masih kurang selektif dalam memilih produk unggulan dan kesesuaian lahannya, sehingga masih perlu diberdayakan
4. Masih tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk agribisnis lokal di pasar-pasar / secara langsung dengan harga terjangkau
5. Masih tersedianya lahan yang cukup di berbagai daerah yang sedang menggalakkan sektor agribisnis sebagai produk unggulan daerah
6. Minat wirausaha dikalangan usaha kecil dan generasi muda makin besar, yang sekaligus menjadi potensi calon pelaku bisnis baru masih besar.
(www.wikipedia.com).

Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk tumbuhnya UKM terutama Usaha Kecilnya. Sektor ini menjadi wadah

penyerapan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lain. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM tingkat perkembangan usaha kecil maupun usaha menengah menunjukkan peningkatan tiap tahun, seperti terlihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel I.1 Perkembangan Usaha Kecil Tahun 2007 dan 2008 Kabupaten Semarang

No	Uraian	2007	2008	Perkembangan (%)
1	Jumlah Pengusaha Kecil	2679	2817	5,15
2	Jumlah Tenaga Kerja	15.502.480	38.313272	147,14

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Sedangkan perkembangan Usaha Menengah terlihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel I.2 Perkembangan Usaha Menengah Tahun 2007 dan 2008 Kabupaten Semarang

No	Uraian	2007	2008	Perkembangan (%)
1	Jumlah Pengusaha Menengah	125	137	9,6
2	Jumlah Tenaga Kerja	7.897.500	12.478.050	58

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Dari dua tabel diatas dapat dilihat bahwa UKM di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan baik dari jumlah pengusaha maupun jumlah tenaga kerjanya. Jenis usaha yang ada pun bermacam-macam yang kesemuannya selalu mengalami perkembangan. Macam-macam usaha yang ada tersebut ada dalam

daftar pembinaan dan pengembangan bidang produksi dan pengolahan dapat dilihat dalam tabel I.3 berikut ini :

Tabel I.3 Data Pembinaan dan Pengembangan Bidang Produksi dan Pengolahan Tahun 2008 Kabupaten Semarang

No	Jenis Industri Unggulan	Jumlah Unit	Produk per bulan	Tenaga kerja
1	Industri Tahu Tempe	181	(Ton)	1.747
2	Makanan Olahan	170	1.045.200 (Buah)	1.472
3	Madu	15	5000 (Liter)	105
4	Meubel dan Pengolahan Kayu	22	1200 (Buah)	150
5	Tanaman Hias	158	87.562 (Buah)	561
6	Sayuran	186	405.000 (Buah)	20
7	Susu Sapi	190	7000 (Liter)	373
8	Kerajinan Enceng Gondok	5	120 (Buah)	40
	Jumlah	927	1.551.709	4.486

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Perkembangan UKM di kabupaten Semarang secara signifikan terus eksis dan berkembang. Dari berbagai jenis sektor UKM unggulan di Kabupaten Semarang, peneliti tertarik untuk meneliti UKM agribisnis dengan pertimbangan karena UKM agribisnis merupakan sektor UKM unggulan, walaupun sektor agribisnis bukan merupakan yang terbanyak jumlahnya di Kabupaten Semarang, namun potensi yang dimiliki oleh sektor ini sangat besar, terlebih didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Semarang yang sebagian besar berupa lahan untuk

bercocok tanam. Berikut ini adalah data mengenai jumlah UKM Agribisnis di Kabupaten Semarang ditinjau tiap kecamatan :

Tabel I.4 Data jumlah UKM Agribisnis Kabupaten Semarang di Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Ungaran Barat	63
2	Ungaran Timur	38
3	Bergas	44
4	Bawen	44
5	Pringapus	14
6	Tuntang	26
7	Ambarawa	60
8	Banyubiru	87
9	Jambu	203
10	Sumowono	26
11	Pabelan	67
12	Bringin	19
13	Getasan	54
14	Tengaran	20
15	Suruh	40
16	Susukan	81
17	Kaliwungu	8
18	Bancak	33
	JUMLAH	927

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Dilihat dari tabel I.3 diatas, jumlah UKM Agribisnis bukan merupakan UKM yang dominan. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang melekat dalam

sektor ini, serta berbagai peluang yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kinerja pemerintah, terutama dinas yang terkait, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang.

Selama ini, kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan UKM, terutama UKM Agribisnis adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta mengikutsertakan UKM-UKM Agribisnis tersebut dalam suatu kegiatan pameran. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini diadakan selama empat kali dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM, terutama UKM agribisnis, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang telah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun hasilnya belum memenuhi target dari pemerintah. Dari jumlah keseluruhan UKM agribisnis yang ada, baru sekitar 35% dari jumlah tersebut yang tersentuh dan baru 5% dari jumlah tadi telah dibina. Keadaan ini dipicu oleh kurangnya antusiasme para pelaku UKM Agribisnis untuk berperan serta dalam kegiatan pemberdayaan UKM ini.

Dalam menjalankan kinerjanya, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjumpai berbagai faktor penghambat seperti terbatasnya sarana prasarana, anggaran, maupun terbatasnya aparat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang itu sendiri. Selain itu ada pula faktor pendukung antara lain yaitu hubungan yang baik dan kekeluargaan antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan pengusaha UKM-UKM, juga bantuan serta kepedulian dari pihak-pihak luar yang mendukung kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis ini sehingga dapat berjalan

dengan baik walaupun hasilnya belum optimal. Adanya berbagai kendala ini menuntut pemberdayaan di kalangan para pelaku agribisnis itu sendiri.

Sehubungan dengan penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang, ada berbagai indikator yang dapat digunakan, antara lain produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Beberapa indikator ini dapat memberikan gambaran penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang bagi para pelaku UKM Agribisnis dalam kurun waktu tertentu dimana pada akhirnya dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja selanjutnya. Secara spesifik indikator – indikator tersebut juga mampu memberikan penilaian tentang tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam mengemban misi pemenuhan kepentingan publik, yaitu untuk memberdayakan UKM Agribisnis dan pada akhirnya juga akan memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan organisasi.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya perumusan masalah digunakan untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah harus dapat menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Dengan melihat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UKM agribisnis di Kabupaten Semarang ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan UKM agribisnis tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional
 - a. Memberi gambaran mengenai kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan UKM agribisnis.
 - b. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan UKM agribisnis.
2. Tujuan Fungsional
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Semarang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan pemberdayaan UKM.
3. Tujuan Individual

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan UKM agribisnis Kabupaten Semarang.

2. Dapat menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai pemberdayaan UKM agribisnis di Kabupaten Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi” (Yeremias T. Keban, Ph. D, 2004 : 191).

Dalam praktek, pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara ekstensif, intensif, dan eksternal. Pengembangan kinerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, pengembangan kinerja secara intensif dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, sedangkan pengembangan kinerja secara eksternal diartikan lebih banyak lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. Pemikiran seperti ini sangat membantu untuk lebih secara valid dan obyektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian (Pollitt dan Boukaert dalam Yeremias T. Keban, Ph.D, 2004 : 192).

Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004) mengartikan kinerja sebagai “...*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period...*”. Dalam definisi ini, aspek yang

ditekankan adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mohammad Mahsun, 2006 : 25).

“Performance measurement is the respondents to give their own definition of performance, in order of to compare or distinguish it according to existing by department or the organisation of ace of a whole.” (Brophy, Peter . www.emerald.com. The international journal for library and information services. volume 9. 2008. Performance Measurement and Metrics).

Dari berbagai pengertian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (*performance*) adalah suatu bentuk prestasi atau tingkat pencapaian hasil dari suatu proses kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Mahmudi (2005 : 21) kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

- 1) Faktor personal/individual, meliputi : pengetahuan, ketrampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- 3) Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- 4) Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dalam Yeremias T. Keban (2004 : 203) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya,

orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendalikan perbuatan tersebut.

- 2) Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.
- 3) Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian suatu bisa kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- 4) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

Ruky dalam Hessel (2005 : 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain.

Sedangkan Soesilo dalam Hessel (2005 : 180-181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- 2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.

- 3) Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- 4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *data base* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- 5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Atmosoeprpto dalam Hessel (2005 : 181-182) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal berikut ini :

- 1) Faktor eksternal yang terdiri dari :
 - a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
 - c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

- 2) Faktor internal yang terdiri dari :
- a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
 - b. Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
 - c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - d. Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

c. Pengukuran Kinerja

Menurut Robertson dalam Mohammad Mahsun (2006 : 25) pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

“Promoters of performance measurement are convinced that performance measurement can greatly contribute to an efficiency boost in the field of public services. Performance measurement will function as an efficiency driver for public services. Also, the empirical basis which investigates the relationship between performance measurement and efficiency is, up to now, very slim.”

(Greiling, Dorothea. www.emerald.com, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume 55, 2009, Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services?).

Sementara menurut Lohman dalam Mohammad Mahsun (2006 : 25-26) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simon menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

“The majority of the theories applied are sceptical about the assumption that performance measurement will act as an efficiency driver. Performance measurement contributes significantly to an increase in efficiency is often articulated in official documents. The chances performance measurement may offer are examined from various theoretical angles. On a theoretical level, the paper contributes to obtaining a clearer picture of the potential performance measurement may offer.” (Greiling, Dorothea. www.emerald.com, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume 55, 2009, Performance measurement: a remedy for increasing the efficiency of public services?).

Elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mohammad Mahsun (2006 : 26-28) adalah sebagai berikut :

1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi, sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas, strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi.

2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci, faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus segera konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan

indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

4) Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan

reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkrit dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Organisasi dengan karakteristik operasional yang berbeda membutuhkan ukuran kinerja yang berbeda pula (Mohammad Mahsun, 2006 : 29-30).

Sementara menurut Mahmudi (2005 : 7) pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

d. Indikator kinerja

Indikator kinerja (*performance indicators*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*), namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator

kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja dalam kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi (Mohammad Mahsun, 2006 : 71).

Dalam Mohammad Mahsun (2006 : 71) definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Lohman dalam Mohammad Mahsun (2006 : 71) indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.

Ada berbagai macam indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik. Menurut Mohammad Mahsun (2006 : 77-78) jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi :

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya manusia, suatu lembaga dapat menganalisis

apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga relevan.

- 2) Indikator proses (*process*), dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan tersebut. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.
- 3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Misalnya untuk kegiatan yang

bersifat penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah.

- 4) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- 5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal (tepat lokasi dan waktu).
- 6) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Bastian dalam Hessel (2005 : 175) menetapkan indikator kinerja organisasi sebagai berikut :

- 1) Indikator masukan (*inputs*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran (*outputs*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
- 3) Indikator hasil (*outcomes*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator manfaat (*benefit*), yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak (*impacts*), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Dwiyanto (2002 : 50-51) ada beberapa macam indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu sebagai berikut:

- 1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga tingkat pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu

sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2) Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik, akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bias menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bias saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih

oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari kuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kumoro dalam Hessel (2006 : 52) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain sebagai berikut :

- 1) Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

2) Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

3) Keadilan

Keadilan mempertanyakan alokasi dan distribusi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

4) Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Mc. Donald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 174) mengemukakan indikator kinerja : output oriented measure thgroughput, efficiency, effectiveness.

- a. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Menurut Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 174-175) mengemukakan indikator kinerja : economy, efficiency, effectiveness, equity.

- a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
- d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Menurut Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 175) mengemukakan indikator kinerja : responsiveness, responsibility, accountability.

- a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
- b. Responsibility atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 175-176) mengemukakan indikator kinerja: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy.

- a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
- b. Reliability atau keandalan adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

- d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
- e. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

Dari penjelasan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauhmana Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UKM Agribisnis di Kabupaten Semarang adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

1) Produktivitas

Konsep produktivitas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang diukur dari seberapa besar pelayanan publik yang diberikan dalam pemberdayaan UKM agribisnis tersebut mampu menghasilkan keluaran/output sesuai dengan yang diharapkan.

2) Responsivitas

Responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberdayaan UKM agribisnis.

3) Akuntabilitas

Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM agribisnis itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM ini tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM atau pemerintah, seperti pencapaian target, tetapi harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan mempunyai arti makna harfiah membuat seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan atau *empowerment*. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistyani, 2004 : 77).

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan mengubah yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap

untuk mengubah kondisi yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan serta ketrampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri karena mereka menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan dan atau kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjuk bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan yang lain.

Ciri-ciri pemberdayaan menurut Korten adalah :

- a. Prakasa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya harus diletakkan pada masyarakat atau komunitas ini sendiri.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat atau komunitas untuk mengelola atau memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk mencukupi kebutuhannya.
- c. Mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.

- d. Menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksikolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek.
- e. Proses pembentukan jaringan antara birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini., baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal (Moeljarto T, 1995 : 26).

Menurut Dr. Anggito Abimanyu dalam Supami 2006, pemberdayaan diartikan sebagai :

“Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang dimaksud bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”.

Ada dua versi yang berbeda mengenai “empowerment” yaitu versi dari *Paul Freire* dan versi yang berasal dari *Shumacher*. Menurut *Paul Freire empowerment* bukanlah hanya sekedar memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja, tetapi lebih dari itu *empowerment* merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan struktur-struktur yang operasional. Kata lain *empowerment* berarti partisipasi masyarakat dalam politik. Sedangkan versi *Shumacher* tentang empowerment kurang berbaur politik. *Schumacher* percaya bahwa manusia itu mampu untuk

membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. *Shumacher* menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah “memberi kail daripada ikan” dengan demikian mereka dapat mandiri. Akan tetapi, empowerment versi *Shumacher* yang memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri juga masih tetap memerlukan dukungan politik. Tanpa adanya dukungan politik sama saja dengan “membantu orang dengan memberi kail tapi orang tersebut tidak diberi hak untuk mengail di sungai”, maka pastilah mereka tidak akan dapat hidup dengan lebih baik (Anggito Abimanyu dalam Supami 2006).

Ginanjari Kartasasmita (1996 : 159 – 160) membicarakan konsep pemberdayaan secara luas, yaitu pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat digunakan dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa pengusaha UMKM agribisnis merupakan anggota dari masyarakat luas. Dalam rangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan dilakukan melalui tiga jurusan :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekalitanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat diperlukan. Melindungi disini tidak berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi karena hal itu justru akan semakin melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Winarni dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2004 : 79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Dalam konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak

untuk menikmati hasil pembangunan. Sebenarnya, banyak para pakar yang telah memberikan definisi partisipasi. Sebagian pakar mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab atas tujuan kelompok tersebut.

Pemberdayaan juga hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Jadi, pemberdayaan bukan membuat masyarakat semakin tergantung dari berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian tentang UKM tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan Negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu Negara berlainan dengan Negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan atau kelompok tersebut, misalnya usaha kecil di United Kingdom adalah suatu usaha bila jumlah karyawannya antara 1 – 200 orang; di Jepang antara 1 – 300 orang; di USA antara 1 – 500 orang (Tiktik Sartika Partomo dan Abdul Rachman Soejoedono, 2002 : 13).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengertian UKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, di Indonesia BPS mempunyai kriteria usaha kecil jika karyawannya 5-19 orang; jika kurang dari 5 karyawan digolongkan usaha rumah tangga, dan usaha menengah terdiri dari 20-99 karyawan.

Menurut Anderson dalam Tiktik Sartika Partomo dan Abdul Rachman Soejoedono (2002 : 15) mengemukakan definisi pengelompokan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja sebagai berikut :

Tabel 1.4 Pengelompokan Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja

Usaha Kecil	- Kecil I – kecil	1 – 9 pekerja
	- Kecil II – kecil	10 – 19 pekerja
Usaha Menengah	Besar – kecil	100 – 199 pekerja
	Kecil – menengah	200 – 499 pekerja
	Menengah – menengah	500 – 999 pekerja
	Besar – menengah	1000 – 1999 pekerja
Usaha Besar	> 2000 pekerja

(Sumber : Partomo, Tiktik Sartika dan Abdul Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia)

Meskipun terdapat banyak definisi mengenai UKM, namun secara umum dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya semua UKM bisa dianggap sama, yaitu

sebagai berikut: (Tiktik Sartika Partomo dan Abdul Rachman Soejoedono, 2002 :

15)

- 1) Struktur organisasi yang sangat sederhana.
- 2) Tanpa staf yang berlebihan.
- 3) Pembagian kerja yang “kendur”.
- 4) Memiliki hierarki manajerial yang pendek.
- 5) Aktifitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- 6) Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.

4. Agribisnis

Agribisnis adalah kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang [ekonomi](#) bagi kegiatan dalam bidang [pertanian](#). Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Secara luas, agribisnis berarti "bisnis berbasis sumber daya alam". Objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya termasuk dalam bagian hulu agribisnis. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten, dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dalam arti luas agribisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja.

Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan produk pertanian berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. (www.wikipedia.com).

Arsyad dalam Dr. Soekartawi (2001 : 2) mengemukakan bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan ada hubungan dengan pertanian dalam artian yang luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

1. Pengertian Fungsional

Agribisnis merupakan rangkaian fungsi-fungsi kegiatan untuk memenuhi kegiatan manusia. Sistem agribisnis mencakup 3 aspek utama, yaitu:

- a. Aspek Pengolahan Usaha (Produksi) pertanian : Pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, perikanan.
- b. Aspek Produk Penunjang Kegiatan Pra-pasca panen : Industri penghasil pupuk, bibit unggul, dll
- c. Aspek sarana Penunjang : Perbankan, pemasaran, penyuluhan, penelitian.

2. Pengertian Struktural

Agribisnis merupakan kumpulan unit usaha atau basis yang melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing subsistem, dan tidak hanya mencakup bisnis pertanian yang besar, tetapi skala kecil dan lemah (pertanian rakyat).

Agribisnis merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang pertanian. Berdasarkan kajian Pusat Studi Industri dan Perdagangan Indonesia (PSIPI) prospek pasar agribisnis akan semakin membaik dengan semakin besarnya peran industri hilir dan kebutuhan produk segar di masyarakat Indonesia. Bidang usaha agribisnis meliputi :

- a. Bidang usaha makanan dan minuman, terutama jenis restoran freshfood, ethnic food, donuts, café, dan coffeeshop di perkotaan khususnya.
- b. Toko pengecer keperluan pribadi dan rumah tangga, termasuk makanan segar dan olahan.
- c. Produk dan jasa pemeliharaan kesehatan serta kecantikan, terutama obat, jamu, dan minuman kesehatan.
- d. Produk dan jasa pariwisata serta entertainment, yang akan mempromosikan makanan khas tradisional maupun fastfood muatan lokal berbasis agribisnis.

5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

UKM memiliki daya tahan yang lebih terhadap berbagai kondisi perekonomian yang terjadi. Hal ini telah dibuktikan saat Indonesia dihantam krisis moneter tahun 1997, sektor usaha kecil menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menjadi penyelamat ekonomi nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah telah memberikan peluang yang baik untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Secara politis, lembaga legislatif telah mengeluarkan produk-

produk hukum yang dapat dijadikan acuan bagi pihak eksekutif dalam mengembangkan dan memberdayakan UKM. Produk-produk hukum itu antara lain, Ketetapan MPR No. XVI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, yang didalamnya menyatakan bahwa "usaha kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan". Selain itu, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil yang berisi tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dalam berbagai bentuk seperti kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain itu juga dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan UKM dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah :

- 1) Bidang produksi dan pengolahan, pembinaan dan pengembangan dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
 - d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.
- 2) Bidang pemasaran, pembinaan dan pengembangan dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
 - b. Menyebarluaskan informasi pasar
 - c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
 - d. Menyediakan sarana dan pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro, kecil, dan menengah.

- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
 - f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- 3) Bidang sumber daya manusia, pembinaan dan pengembangan dilakukan dengan cara:
- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
 - b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial
 - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- 4) Bidang desain dan teknologi, pembinaan dan pengembangan dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
 - c. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
 - d. Memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.
 - e. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008, maka untuk memberdayakan UKM dituntut kinerja yang menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan dari

Dinas Koperasi dan UMKM sehingga mampu menumbuhkan serta meningkatkan eksistensi UKM tersebut.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

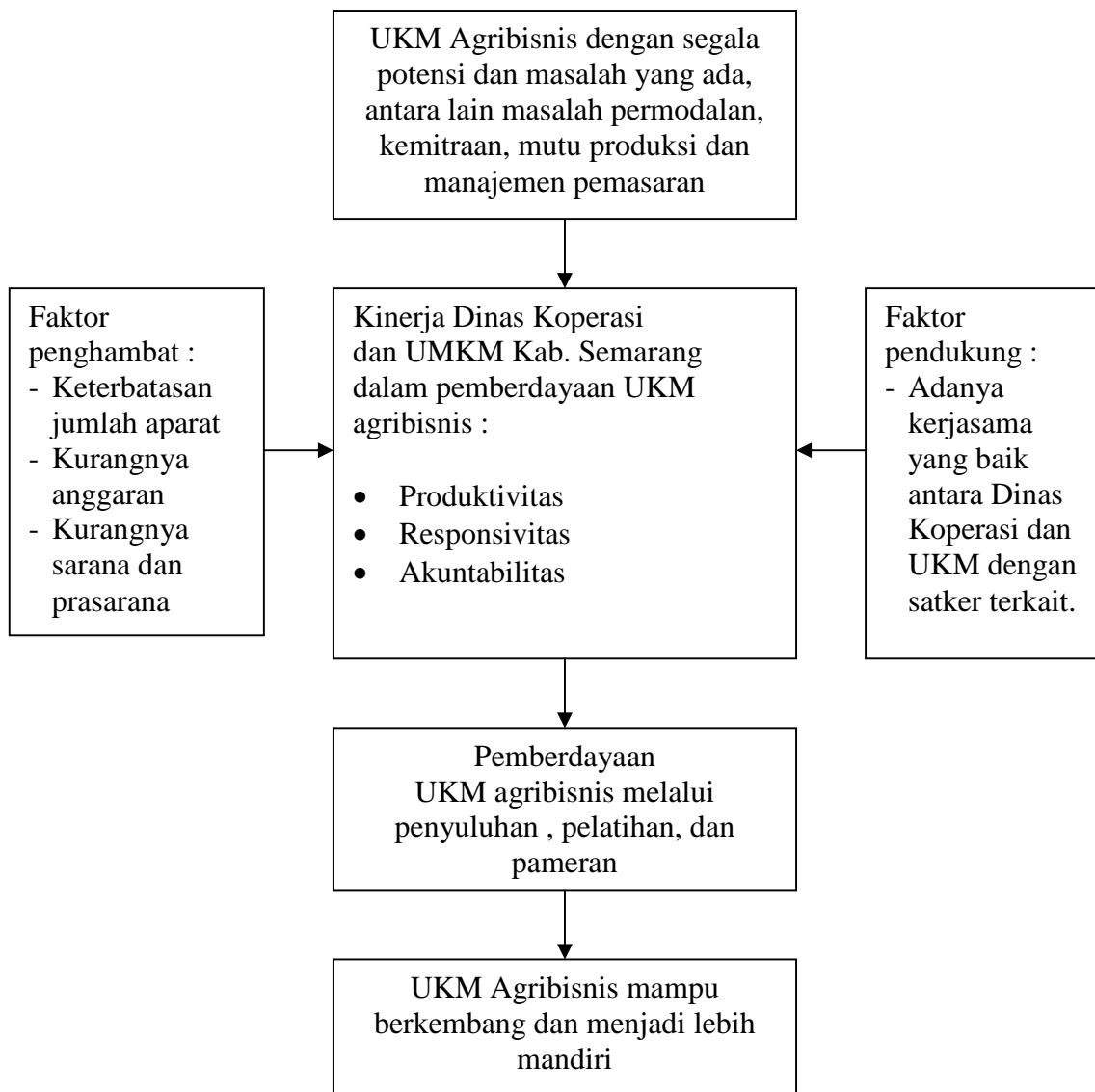
Kabupaten Semarang sebagai kota industri, pariwisata, dan perdagangan setiap tahunnya banyak menarik pendatang untuk mencari pekerjaan yang menyebabkan meningkatnya suplai tenaga kerja. Eksistensi UKM khususnya UKM agribisnis di Kabupaten Semarang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini sektor UKM menjadi alternatif bagi pemenuhan kesempatan kerja dari sekian banyak suplai tenaga kerja yang ada. Namun, dalam perkembangannya UKM juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Semarang, mempunyai tanggung jawab teknis bagi pemberdayaan UKM di Kabupaten Semarang melalui berbagai macam program-program kerja atau kegiatan-kegiatan operasional dalam pemberdayaan UKM (agribisnis).

Dalam usaha pemberdayaan UKM agribisnis, diperlukan kinerja yang baik dari Dinas Koperasi dan UKM untuk mewujudkan UKM agribisnis agar terus maju dan berkembang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UMKM telah memiliki berbagai program dan rencana yang akan dilaksanakan, walaupun dalam perjalanannya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat. Faktor penghambat adalah faktor yang harus segera diatasi

karena dapat mengganggu berjalannya program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM. Faktor penghambat disini, tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM saja, tetapi juga berpengaruh pada eksistensi UKM itu sendiri. Kerangka pemikiran ini dapat diperjelas dalam skema berikut :

Gambar I.1
Skema Kerangka Pemikiran



G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian menggunakan metode deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2002 : 3) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data-data yang telah terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini ditentukan dengan maksud untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena yang akan diteliti. Lokasi yang diambil adalah Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Semarang dengan kasus yang diamati adalah kinerja Dinas Koperasi dan UMKM, dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tanggung jawab teknis dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UKM. Disamping itu, untuk UKM agribisnis, penelitian dilakukan di daerah sentra. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melakukan observasi maupun pengumpulan data-data yang lain.

3. Metode Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk menentukan sumber data digunakan dua metode, yaitu:

a. *Purposive Sampling*

Riset kualitatif tidak memilih sampling (cuplikan) yang bersifat acak atau *random sampling*. Teknik cuplikannya cenderung bersifat *purposive* karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data didalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pilihan sampling diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Cuplikan ini memberikan kesempatan maksimal pada kemampuan peneliti untuk menyusun teori yang dibentuk dari lapangan. Dalam penerapan teknik ini peneliti memberikan pertanyaan pada informan yang lebih tahu tentang objek yang diteliti. Jadi peneliti berusaha mencari tahu siapa orang yang bersangkutan (objek yang mengetahui) tentang hal tersebut (HB. Sutopo, 2002 : 56).

b. *Snowball Sampling*

Informan dalam hal ini dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan informan tersebut dapat menunjukkan informan yang lebih tahu dalam mendapatkan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan bertanya langsung pada informan. Menurut Lexy J. Moleong (2002 : 135), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang akan dinyatakan dalam proses wawancara.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung situasi, kondisi, serta berbagai kegiatannya (Lexy J. Moleong, 2002 : 125).

c. Dokumentasi

Dokumen berguna untuk menunjang dalam pengumpulan data. Dokumen ini terdiri dari tulisan, artikel, buku, dokumen, arsip, laporan-laporan serta data statistik yang membahas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Data-data yang diperoleh dari pengumpulan dokumentasi kemudian dapat dijadikan referensi yang menunjang proses penelitian (HB. Sutopo, 2002 : 54).

5. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara yang didukung dengan observasi. Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Seksi Permodalan UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang.

- 2) Kepala Seksi Kemitraan UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang.
- 3) Para pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang.
- 4) Beberapa pengusaha agribisnis di sentra agribisnis Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui arsip, laporan, catatan statistik, buku-buku dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, maka peningkatan validitas data akan dilakukan dengan teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Untuk itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Menurut Lexy J. Moleong (2002 : 178), triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengecek (cross check) kebenaran data tersebut dengan cara membandingkannya dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang lain. Dengan kata lain data akan dikontrol oleh data yang sama namun dengan sumber yang berbeda.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik tetapi menggunakan kata-kata tertentu dan menghubungkannya secara kualitatif. Model analisa yang digunakan adalah model analisa interaktif dari Miles dan Huberman (HB. Sutopo, 2002 : 96). Dalam model analisa ini ada 3 komponen tahap analisa data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan dan berlangsung terus menerus selama proses penelitian. Tahapan ini merupakan bagian dari analisa yang bertujuan mempertegas, menajamkan, membuat fokus, mengarahkan, membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu simpulan.

b. Sajian Data

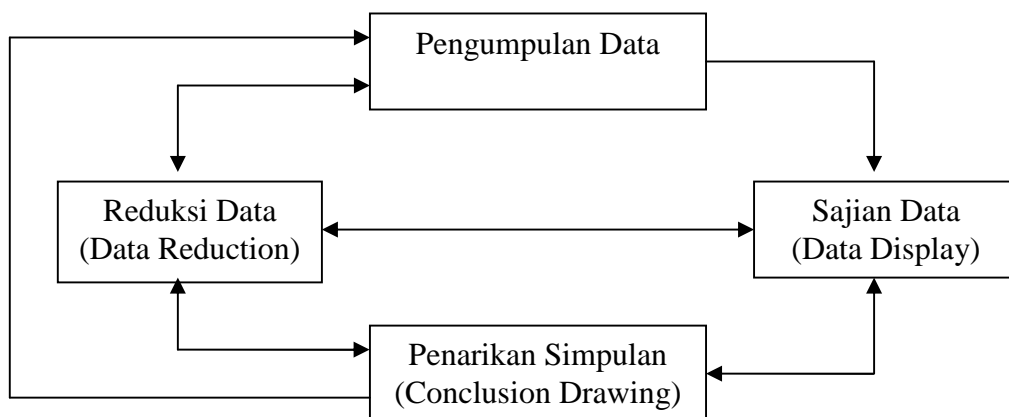
Sajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil. Dengan melihat Sajian data peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi kemudian lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasar pemahamannya tersebut. Sajian data ini meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, keberkaitan antara kegiatan dan tabel.

c. Penarikan Simpulan

Merupakan suatu pengorganisasian data-data yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan dan dibandingkan antara yang satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dengan adanya reduksi data dan sajian data diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Ketiga komponen tersebut aktifitasnya dilakukan dengan interaksi dengan proses siklus. Peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dari awal. Untuk lebih jelasnya, skema dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2
Skema Model Analisis Interaktif



(Sumber : HB Sutopo, 2002 : 96)

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. SEKILAS KABUPATEN SEMARANG

Secara astronomis Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020,674 Ha dengan suhu yang relatif sejuk karena berada pada ketinggian 318 – 1450 meter dari permukaan laut.

Letak geografis Kabupaten Semarang sangat strategis karena dikelilingi oleh pegunungan. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan ditengah – tengah wilayahnya terdapat Kota Salatiga. Kesemua daerah ini mempunyai berbagai potensi yang variatif, dan bias memberikan dukungan bagi Kabupaten Semarang untuk lebih maju.

Secara administrasi, Kabupaten Semarang sejak tahun 2004 terbagi dalam 18 kecamatan. Luas Kabupaten Semarang sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, serta sekitar 24.822,5485 Ha atau 26,12% dari luas wilayahnya berupa lahan pertanian.

Dengan memperhatikan letak dan posisi yang strategis, menjadikan Kabupaten Semarang cukup dikenal di berbagai daerah. Letak yang strategis ini tentunya sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten

Semarang menjadi lebih maju. Salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan usaha – usaha, baik usaha pariwisata, perumahan, industri, perdagangan, perhotelan dll. Selain itu, usaha – usaha kecil dan menengah juga makin beragam, salah satunya usaha di sektor agribisnis, terlebih terdapat sentra agribisnis di Kecamatan Ambarawa yang merupakan sentra penghasil sayuran di Jawa Tengah.

B. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SEMARANG

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang merupakan wadah bagi koperasi maupun pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam membantu mengembangkan usaha mereka. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang secara lebih rinci dapat dilihat dari sub bab berikutnya.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UMKM diatur dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang. Dimana disesuaikan dengan masing-masing jabatan yang diemban, yaitu :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Merumuskan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- g. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas.
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas.
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, bagian sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administarsi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Dinas.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, bagian sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian-Subbagian.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas.
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas.
 - g. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat.
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. SubBagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data pertanian, perkebunan, dan kehutanan untuk disajikan sebagai data statistic.
- f. Menyiapkan bahan proses pencairan dna dan pengelolaan administrasi umum.
- g. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas.
 - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan.
 - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. SubBagian Umum dan Kepegawaian
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Dengan rincian tugas :
- a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administarsi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

- d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal.
- f. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kependidikan (DUK), normatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian.
- g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Koperasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah dibidang koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kebijakan Bidang Koperasi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi.
- c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan Bidang Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang koperasi mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Koperasi.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan usaha.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahka pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi.
- e. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, evaluasi dan kerjasama dibidang kelembagaan dan usaha.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi.
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Koperasi terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Seksi Usaha

6. Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dibidang kelembagaan. Dengan rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dibidang kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional pembinaan dan pengawasan teknis.
- d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan analisis potensi serta masalah perkoperasian di Kabupaten Semarang.
- e. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas tentang teknis kelembagaan meliputi pembentukan, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi.
- f. Menyiapkan bahan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan serta pembubaran koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*tugas pembantuan*).
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai pedoman dan atau peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan pembinaan organisasi dan manajemen kelompok, gerakan pra koperasi, koperasi serta koperasi sekolah.
- k. Melaksanakan pemeringkatan koperasi sebagai bahan evaluasi dan penyampaian bahan kebijakan.
- l. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi tentang kelembagaan koperasi.
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan.
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan.
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Seksi Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dibidang usaha koperasi. Dengan rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan.

- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dibidang kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi dalam pengembangan jaringan usaha, permodalan, dan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha koperasi di Kabupaten Semarang.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis bagi pengembangan dan pematapan usaha koperasi.
- f. Melaksanakan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi bidang produksi, distribusi dan jasa.
- g. Menyelenggarakan temu usaha dalam rangka kemitraan koperasi.
- h. Memfasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil usaha koperasi.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha.
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha.
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang UMKM memiliki fungsi :

- a. Perumusan program kebijakan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Usaha UMKM memiliki rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang permodalan dan kemitraan.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Menyenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, evaluasi dan kerjasama dibidang permodalan dan kemitraan.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Permodalan dan Seksi Kemitraan.

9. Seksi Permodalan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang permodalan. Dengan rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Permodalan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dibidang permodalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyusun data/informasi/peta permodalan UMKM Kabupaten Semarang.
- e. Memfasilitasi akses pendanaan/penyediaan sumber dana dan pembiayaan bagi UMKM melalui lembaga keuangan Bank/Non Bank

(Kredit perbankan, hibah, modal ventura, BUMN, penjaminan lembaga bukan bank).

- f. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan UMKM kearah pembentukan kelompok/sentra-sentra.
- g. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pengembangan manajemen UMKM dalam mengakses permodalan.
- h. Memfasilitasi pelatihan ketrampilan melalui kegiatan pemagangan.
- i. Menyiapkan bahan rekomendasi bagi UMKIM untuk pengajuan fasilitasi permodalan pada pemerintah, BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan lainnya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Permodalan.
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Permodalan.
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Seksi Kemitraan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kemitraan.

- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dibidang kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyusun data/informasi/pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan fasilitasi perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah guna memberikan kepastian usaha dan persaingan usaha yang sehat.
- f. Memfasilitasi kegiatan temu usaha dan jaringan kemitraan bagi UMKM dengan pengusaha menengah/besar.
- g. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan penyuluhan serta fasilitasi legalitas/sertifikasi bagi UMKM.
- h. Mengembangkan penyediaan layanan bisnis serta memfasilitasi kegiatan promosi dan kontak dagang.
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga Pembina UMKM.
- j. Memfasilitasi pengembangan alih teknologi bagi UMKM dengan lembaga akademis atau lembaga lain.
- k. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan Praktek Kerja Lapangan bagi UMKM.
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegaitan Seksi Kemitraan.

- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi kemitraan.
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bidang Pengawasan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang pengawasan memiliki fungsi :

- a. Perumusan program kebijakan Bidang Pengawasan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan.
- c. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan Bidang Pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengawasan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pengawasan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, evaluasi dan kerjasama dibidang pengawasan.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pengawasan.
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengawasan terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Seksi Pengendalian.

12. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dibidang pengawasan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dibidang pengawasan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- d. Mengadakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi untuk mengetahui sejauhmana kelayakan suatu koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengawasan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan klarifikasi atas kasus/dugaan penyimpangan yang terjadi pada gerakan koperasi.
- g. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan fungsi, peran, dan prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengendalikan dan mengadakan evaluasi pemanfaatan fasilitas kredit agar tidak terjadi penyimpangan keuangan koperasi.
- i. Memberikan sanksi administratif kepada koperasi serba usaha yang melalaikan kewajibannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Seksi Pengendalian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dibidang pengendalian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pengendalian memiliki rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi pengendalian.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan Kepala Dinas tentang teknis pengendalian KSP/USP.
- d. Menyusun data/informasi kegiatan KSP/USP.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSP/USP.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas (pembantuan) dalam pengawasan KSP dan USP.
- g. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP.
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP/USP.
- i. Memberikan saksi administratif kepada KSP/USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian.

- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian.
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. FORMASI KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SEMARANG

Pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM sampai sekarang berjumlah 30 orang. Yang kesemuanya telah terbagi dalam tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selain itu, terdapat beberapa formasi kepegawaian, yaitu :

Tabel II.1 Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
S2	3	10
S1	19	63,3
Sarjana Muda	1	3,3
SMA/SMEA/STM	7	23,3
Jumlah	30	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang rata-rata sudah mengenyam pendidikan dasar. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai paling tinggi adalah S1 yaitu 63,3% dari 30 pegawai. Tingkat pendidikan paling tinggi yang dimiliki

pegawai adalah Strata 2. Sebagian besar pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang memiliki tingkat pendidikan S1 keatas, yaitu sebesar 63,3%, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang cukup tinggi.

Selain itu juga terdapat formasi kepegawaian berdasarkan tingkat golongan, yaitu :

Tabel II.2 Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Berdasarkan Tingkat Golongan

Tingkat Golongan	Jumlah	%
I/a	-	0
I/b	-	0
I/c	-	0
I/d	-	0
II/a	1	3,3
II/b	-	0
II/c	-	0
II/d	2	6,6
III/a	4	13,3
III/b	7	23,3
III/c	7	23,3
III/d	3	10
IV/a	5	16,6
IV/b	1	3,3
IV/c	-	0
IV/d	-	0
IV/e	-	0
Jumlah	30	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang sebagian besar adalah golongan III, yaitu sebanyak 21 pegawai atau 70% dari seluruh jumlah pegawai. Sedangkan

pegawai yang golongannya paling tinggi yaitu golongan IV hanya 20% dari seluruh jumlah pegawai.

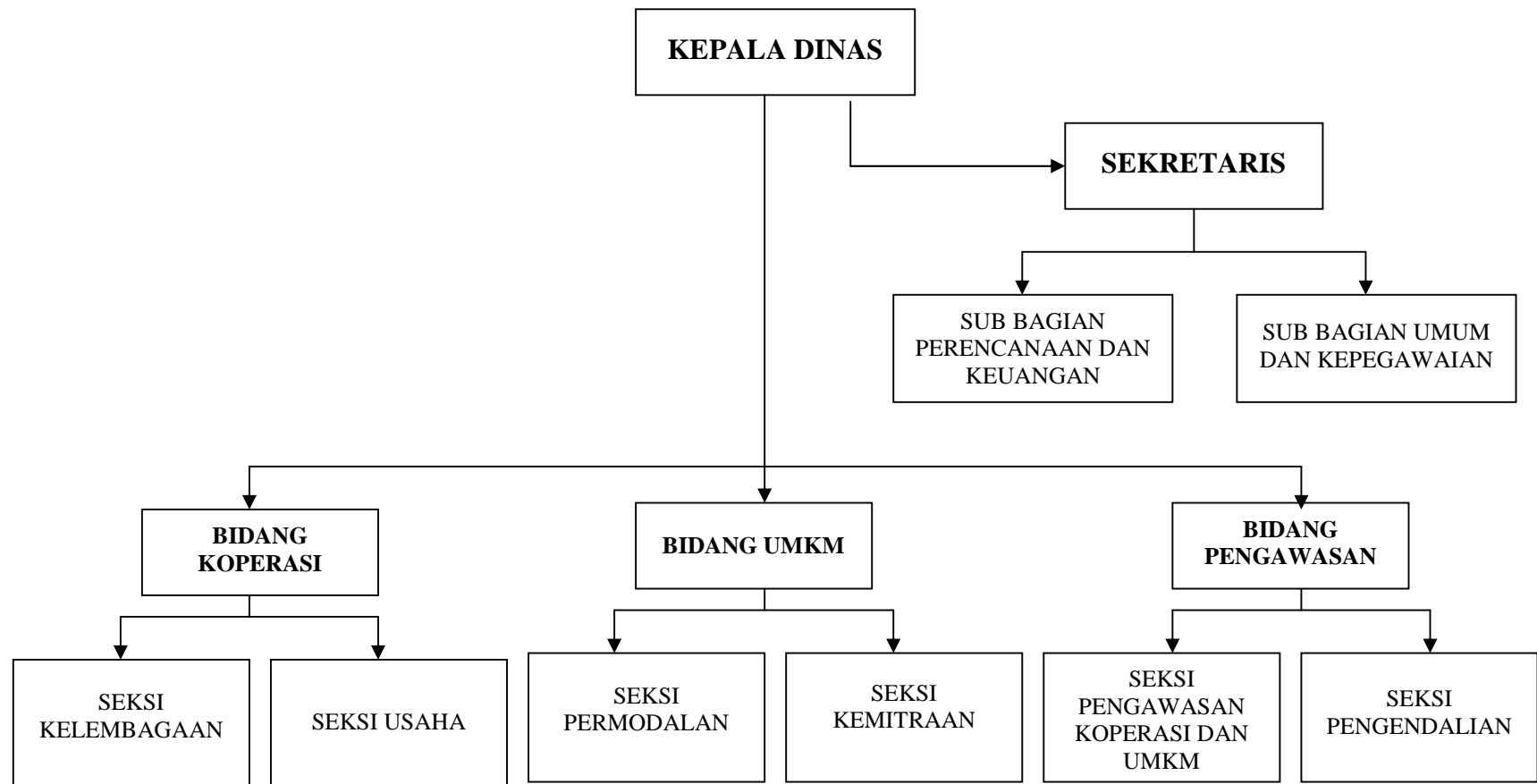
**Tabel II.3 Formasi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki – laki	17	56,6
Perempuan	13	43,3
Jumlah	30	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai laki – laki di Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang lebih banyak dibanding jumlah pegawai perempuan, yaitu sejumlah 17 orang atau 56,6%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 13 orang atau 43,3%.

E. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Penilaian organisasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Perbaikan kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kepentingan orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Perbaikan kinerja akan memiliki implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Pelayanan optimal diwujudkan dalam suatu bentuk kinerja organisasi yang mana di dalam kinerja tersebut memuat indikator-indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan UKM sektor agribisnis. Untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UKM Sektor Agribisnis digunakan indikator-indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu juga akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan UKM sektor agribisnis tersebut.

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas dapat dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, konsep produktivitas dibahas mengenai sejauhmana pemberdayaan UKM sektor agribisnis yang dilakukukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dan bagaimana hasil pemberdayaan yang dirasakan oleh pengusaha UKM agribisnis di Kabupaten Semarang yaitu dengan cara membandingkan prosedur atau target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang dijalankan di lapangan, apakah sesuai target atau tidak.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM tingkat perkembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah menunjukkan peningkatan tiap tahun. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1.1, sedangkan perkembangan Usaha Menengah dapat dilihat dalam tabel 1.2. dari dua tabel tersebut dapat dilihat bahwa UKM di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan baik jumlah pengusahanya maupun jumlah tenaga kerjanya. Jenis usaha yang ada pun bermacam-macam yang kesemuanya selalu mengalami perkembangan. Hal

tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Sejak krisis memang jumlah UKM di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan secara signifikan yang otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan keterangan yang diutarakan oleh Ibu Sri Suhartini, S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan UKM sebagai berikut:

“Benar mbak, sejak krisis banyak terjadi pengangguran di Kabupaten Semarang. Hal ini menyebabkan mereka akhirnya banyak yang mendirikan usaha sendiri yang termasuk usaha dalam skala kecil menengah. Oleh karena itu, UKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

Jenis usaha yang adapun bermacam-macam yang kesemuanya selalu mengalami perkembangan. Macam-macam usaha tersebut ada dalam daftar pembinaan dan pengembangan bidang produksi dan pengolahan yang dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Jenis UKM yang kami bina bermacam-macam ada agribisnis, aneka jasa, konfeksi, dan lainnya. Yang kesemuanya sampai tahun 2008 berjumlah 11524 dengan tenaga kerja yang terus bertambah.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

Untuk mengetahui berapa banyak pengusaha UKM agribisnis maka sebelumnya dilakukan upaya pendataan terhadap pengusaha UKM agribisnis melalui isian profil yang disebar oleh Dians Koperasi dan UMKM. Dari profil

yang telah diisi tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah UKM agribisnis yang terdapat di Kabupaten Semarang.

Salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Semarang adalah usaha agribisnis yang sebagian besar diberdayakan melalui program pengembangan sentra UKM yaitu di daerah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Banyaknya warga yang terjun di sektor agribisnis menjadikan daerah tersebut sebagai sentra agribisnis. Yang dimaksud dengan sentra adalah pusat kegiatan di kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama/sejenis, menghasilkan produk yang sama serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster, sehingga nantinya kegiatan ekonomi saling terkait dan mendukung. Dengan sentra UKM maka dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Dengan demikian UKM akan berfungsi sebagai wujud pembangunan sistem ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM Kab. Semarang sebagai berikut:

“Untuk UKM agribisnis di Kabupaten Semarang memang paling banyak tidak berada di kawasan Ambarawa, tapi Ambarawa dijadikan sebagai daerah sentra UKM agribisnis karena letaknya strategis. Ya tujuannya agar mempermudah dalam membina dan mengembangkan UKM-UKM agribisnis tersebut.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

UKM yang terletak di sentra ini kebanyakan merupakan usaha turun temurun walaupun tidak sedikit juga pengusaha-pengusaha baru yang mampu mendirikan usahanya sendiri. Mayoritas warga setempat berprofesi sebagai

pedagang sayuran dan tanaman hias baik skala kecil, menengah maupun besar. Produk mereka mulai dari bunga krisan, bunga mawar, sayuran dan lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Sri Suhartini, S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan UKM sebagai berikut:

“Di sentra UKM agribisnis Ambarawa usahanya macam-macam mbak dari berbagai macam bunga, sayuran, buah-buahan, aneka olahan makanan. Usaha mereka umumnya warisan orang tua, tapi ada yang berdiri sendiri. Usahanya ada yang sudah berskala besar, menengah ataupun kecil.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

Keterangan diatas senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Maryamah salah seorang pengusaha tanaman hias sebagai berikut:

“Usaha ini dirintis oleh orang tua saya sejak tahun 1980-an mbak, ya sudah lumayan lama. Saya cuma nerusin saja. Produknya juga macem-macam ada bunga krisan, bunga aster, bunga lily, paling banyak ya bunga mawar. Ini semua hasil dari kebun sendiri mbak.” (Wawancara, 30 Mei 2009).

Walaupun usaha agribisnis bukan merupakan yang terbesar di Kabupaten Semarang, namun potensi yang dimiliki usaha ini untuk terus berkembang sangatlah besar. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya kemampuan usaha ini untuk merekrut tenaga kerja, selain itu agribisnis mempunyai kontribusi dalam perekonomian daerah serta menjadi salah satu industri unggulan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini tentu saja menjadi prioritas untuk dikembangkan dan terus diberdayakan bagi Pemkab khususnya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penanggungjawab bagi pengembangan dan pemberdayaan UKM agribisnis di Kabupaten Semarang, sehingga nantinya UKM

agribisnis dapat berkembang lebih baik dan akan lebih mandiri. Data dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

Tabel III.1 Data Jumlah UKM Agribisnis Kabupaten Semarang di Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Ungaran Barat	63
2	Ungaran Timur	38
3	Bergas	44
4	Bawen	44
5	Pringapus	14
6	Tuntang	26
7	Ambarawa	60
8	Banyubiru	87
9	Jambu	203
10	Sumowono	26
11	Pabelan	67
12	Bringin	19
13	Getasan	54
14	Tengaran	20
15	Suruh	40
16	Susukan	81
17	Kaliwungu	8
18	Bancak	33
	JUMLAH	927

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Memang Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM termasuk didalamnya UKM agribisnis. Walaupun UKM agribisnis bukan merupakan UKM terbesar, tapi potensinya sangat besar. Dapat dilihat dari produk yang berkualitas, tenaga kerja yang semakin meningkat dan lainnya.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Achmad salah satu pengusaha sayuran terbesar di Pasar Ngasem, Ambarawa sebagai berikut:

“Usaha ini sudah saya rintis lama banget mbak, kira-kira 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah maju. Dari omset, tenaga kerja, dan wilayah pemasaran. Sekarang ini saya punya 23 pegawai padahal dulu hanya 4 saja.” (Wawancara, 30 Mei 2009)

**Tabel III.2 Data Omset Bidang Produksi dan Pengolahan Agribisnis
Tahun 2008 Kabupaten Semarang**

No	Jenis Industri Unggulan	Omset Penjualan 2007 (Per Bulan)	Omset Penjualan 2008 (Per Bulan)	Perkembangan (%)
1	Industri Tahu Tempe	Rp 5.407.875	Rp 7.837.500	44,19
2	Makanan Olahan	Rp 85.538.920	Rp 137.966.000	61,29
3	Madu	Rp 2.437.500	Rp 3.750.000	53,8
4	Mebel dan Pengolahan Kayu	Rp 2.318.470	Rp 3.680.000	58,72
5	Tanaman Hias	Rp 6.783.750	Rp 10.125.000	49,25
6	Sayuran	Rp 7.223.860	Rp 10.945.250	51,51
7	Susu Sapi	Rp 5.529.558	Rp 8.131.700	47,05
8	Kerajinan Enceng Gondok	Rp 3.834.500	Rp 5.400.000	40,85
		Rp 119.074.433	Rp 187.835.450	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang 2008

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata omset penjualan UKM agribisnis perbulan selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2007 rata-rata omset penjualan mereka perbulan hanya sebesar Rp 119.074.433, tetapi pada tahun 2008 rata-rata omset penjualan mereka naik menjadi Rp 187.835.450 per bulan. Dalam jangka satu tahun tersebut para pengusaha agribisnis di Kabupaten Semarang mampu meningkatkan omset penjualan perbulan mereka hingga 57,75%. Peningkatan omset rata-rata penjualan perbulan UKM agribisnis tersebut merupakan salah satu indikator cukup suksesnya program pemberdayaan UKM agribisnis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang.

Selain memiliki banyak potensi, dalam perjalanannya UKM agribisnis juga menemui berbagai hambatan dan permasalahan. Persoalan yang dihadapi tiap pengusaha agribisnis berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Persoalan-persoalan itu antara lain permodalan, bahan baku, teknologi, manajemen, kemitraan, persaingan yang tajam, pemasaran, ketersediaan infrastruktur, bahkan pelayanan birokrasi. Selain itu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar dalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM agribisnis dengan semakin banyak barang yang masuk dari luar negeri akibat dampak globalisasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Persoalan yang dihadapi UKM agribisnis itu bermacam-macam mbak, dari masalah permodalan, kemitraan, teknologi, bahan baku, manajemen, pemasaran, dan lainnya. Kelesuan ekonomi akibat krisis dan pengaruh

arus globalisasi juga jadi persoalan yang tidak bisa dihindari.”
(Wawancara, 25 Mei 2009)

Oleh karena itu, pembinaan dan pemberdayaan UKM agribisnis saat ini dirasa semakin mendesak dan semakin diperlukan untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM agribisnis diharapkan dapat tercapai. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini kegiatan pemberdayaan untuk UKM agribisnis di Kabupaten Semarang belum dapat terealisasi secara keseluruhan. Dari jumlah keseluruhan UKM agribisnis yang ada, target baru sekitar 35% yang sudah tersentuh dan sekitar 5% dari jumlah tadi telah terbina.

Dengan hasil pemberdayaan UKM agribisnis yang belum mencapai target dari pemerintah maka akan sulit diketahui apakah UKM agribisnis tersebut perlu pembinaan atau tidak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Olfa Baskarani, S.Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“Sebenarnya jumlah UKM itu sangat banyak mbak, namun yang baru tersentuh hanya 35%nya saja, itupun yang dibina baru sekitar 5%. Kita juga sulit untuk turun ke lapangan karena jumlah personil terbatas.”
(Wawancara, 25 Mei 2009)

Dari penuturan Bapak Olfa Baskarani, S.Sos dapat disimpulkan bahwa jumlah UKM, terutama UKM agribisnis belum dapat diketahui secara pasti, ini disebabkan karena hasil pendataan yang dilakukan belum sesuai dengan target pemerintah. Pendataan tidak mencapai hasil maksimal karena antusiasme para pengusaha UKM agribisnis sangat kurang.

Pendataan pengusaha UKM agribisnis yang perlu pembinaan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan cara meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dari penyuluhan itu masyarakat diharapkan untuk secara aktif mengisi profil UKM agribisnis yang dimilikinya untuk kemudian didata agar dapat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM tidak secara aktif terjun ke masyarakat untuk mendata para pengusaha UKM agribisnis tetapi para pengusaha UKM agribisnis sendiri yang diharapkan datang ke Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan cara ini aspek yang diandalkan adalah penyuluhan karena jika penyuluhan tidak mengena kepada pengusaha agribisnis, maka pengusaha agribisnis tidak akan secara aktif memberikan profil usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM menerapkan cara ini karena mengantisipasi jika ada UKM agribisnis yang gagal dalam menjalani pembinaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Enny Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Jadi sebenarnya kita itu bekerjasama dengan satker yang berhubungan dengan agribisnis seperti Diperindag dan Disnakertrans, dari mereka kita bisa tahu keadaan UKM agribisnis ini, kita tidak boleh aktif mencari UKM agribisnis karena takutnya kalau sudah dibina malah gagal, malah nanti kita yang disalahkan. Kalau kesadaran dari pihak UKM agribisnis sendiri untuk diberi penyuluhan dan pelatihan walaupun nantinya gagal itu tidak masalah kita.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Suhartini, S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan UKM sebagai berikut:

“Pendataan jumlah UKM agribisnis ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode jemput bola dan menunggu. Metode jemput bola dilaksanakan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan lewat pameran dan penyuluhan di sentra-sentra agribisnis. Kalau yang menunggu yaitu para pengusaha UKM agribisnis datang sendiri untuk memberikan profil

usahanya untuk didata dan masuk pada daftar pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM.” (Wawancara, 25 Juni 2009)

Dari penjelasan Ibu Sri Suhartini, S. Sos ini menerangkan bahwa metode yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam memperoleh data UKM agribisnis adalah dengan memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada pengusaha UKM agribisnis. Penyuluhan diharapkan akan menyadarkan pengusaha UKM agribisnis tentang pentingnya pembinaan. Oleh karena itu, pengusaha UKM agribisnis diharapkan secara aktif memberikan profil usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Disini peran aktif pengusaha UKM agribisnis menjadi sangat penting agar kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kegiatan pemberdayaan melalui penyuluhan dan pelatihan disini dilaksanakan oleh aparat Dinas Koperasi dan UMKM dengan mendatangi sentra-sentra agribisnis yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan pengusaha UKM agribisnis saling tukar informasi mengenai kegiatan pengembangan usaha agribisnis. Oleh karena itu, aparat Dinas Koperasi dan UMKM dituntut untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha UKM agribisnis dan berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan usaha UKM agribisnis tersebut.

Pada umumnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan setiap tiga bulan. Namun, waktu kegiatan sering tidak dilaksanakan secara rutin ini disebabkan oleh faktor banyaknya UKM di Kabupaten Semarang. Yang juga

menjadi masalah adalah keterbatasan jumlah aparat pelaksana yang hanya 6 orang. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Olfa Baskarani, S. Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“Penyuluhan dan pelatihan itu tidak dilaksanakan setiap saat, tapi dilihat dari kebutuhan dan itu dilaksanakannya tidak tentu, biasanya sih 4 kali per tahun. UKM yang harus dibina kan banyak banget bukan cuma agribisnis saja, jadi ya bagi-bagi waktu lah mbak.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Selain kegiatan pelatihan dan penyuluhan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka memberdayakan UKM agribisnis adalah mengikutsertakan para pengusaha agribisnis dalam kegiatan pameran. Manfaat yang diharapkan dengan mengikuti pameran adalah minimal masyarakat mengetahui produk agribisnis dari Kabupaten Semarang bahkan membeli produk tersebut hingga nantinya dapat berkembang sehingga memiliki banyak pelanggan dan pasar yang luas. Hal ini senada dengan wawancara dengan Bapak Olfa Baskarani, S. Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“UKM-UKM agribisnis itu kadang kita ikutkan pameran juga mbak, supaya produknya dikenal orang sukur-sukur dapat pelanggan.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Hal diatas sesuai dengan wawancara dengan seorang pengusaha makanan olahan sebagai berikut:

“Kami sering ikut pameran mbak, disana kami bisa memamerkan dan menjual produk usaha kami. Ya itung-itung ikut menyemarakkanlah mbak.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu memberdayakan UKM agribisnis telah memberikan manfaat bagi para

pengusaha agribisnis tersebut. Manfaat ataupun keuntungan yang dialami oleh pengusaha agribisnis diantaranya adalah semakin luasnya pasar, kemudahan mendapat modal, bertambahnya tenaga kerja, berkembangnya usaha yang secara langsung meningkatkan pendapatan, serta bertambahnya kemandirian dalam berusaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nunik salah satu pengusaha makanan olahan di Ambarawa sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, dengan mengikuti pameran, usaha saya menjadi lumayan berkembang karena pelanggan menjadi lumayan bertambah, malah pesanan lebih banyak dari luar kota seperti Salatiga, Temanggung dan Magelang. Apalagi mendekati lebaran dan natal. Tenaga kerja juga bertambah menjadi 5 orang.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

**Tabel III.3 Data Peserta Pelatihan Manajemen Pemasaran
Tahun 2007 dan 2008**

No	Peserta Tahun 2007 (11 Mei 2007)	Peserta Tahun 2008 (11 September 2008)
1	Bapak Achmad (Sayuran)	Bapak Irfani (Enceng Gondok)
2	Bapak Bambang (Tahu Tempe)	Ibu Nunik (Makanan Olahan)
3	Ibu Siti (Makanan Olahan)	Ibu Maryamah (Tanaman Hias)
4	Bapak Ansori (Krupuk)	Ibu Rahayu (Makanan Olahan)
5	Ibu Lestari (Tanaman Hias)	Bapak Muhamad (Tahu Tempe)

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Ibu Nunik juga telah berkesempatan mengikuti pelatihan manajemen yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Hasilnya, beliau merasa wawasannya semakin bertambah. Pengetahuan mengenai pembuatan produk dan

cara memasarkan yang baik pun telah ia dapatkan sehingga dapat diterapkan dalam mengembangkan usahanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Irfani salah satu pengusaha kerajinan enceng gondok di Banyubiru sebagai berikut:

“Saya juga sudah ikut pelatihan dan pameran mbak, dari pelatihan saya mendapat pengalaman cara menjalankan usaha yang baik dan bagaimana meningkatkan mutu produksi, memilih bahan baku, dan bagaimana pemasaran yang baik, setelah itu saya ikut pameran, dan hasilnya pun positif, usaha saya makin berkembang.” (Wawancara, 31 Mei 2009)

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas Dinas Koperasi dan UMKM belum menampakkan hasil yang optimal dalam rangka memberdayakan UKM agribisnis. Hal ini terlihat dari hasil pembinaan terhadap UKM agribisnis yang belum dapat mencapai target dari pemerintah. Hasil yang dicapai hanya sepertiga dari yang ditargetkan oleh pemerintah karena pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan penyuluhan belum mencapai ke seluruh UKM agribisnis yang ada dan antusiasme para pengusaha UKM agribisnis yang belum cukup baik yang mana hal ini mengakibatkan banyak UKM agribisnis yang belum mendapat penyuluhan dan pelatihan. Hal inilah yang menyebabkan target pembinaan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. Indikator Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi, dan memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan, dan aspirasi para pengusaha UKM dalam pemberdayaan UKM agribisnis.

Dalam operasionalnya Dinas Koperasi dan UMKM juga harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan para pengusaha UKM agribisnis sehingga pemberdayaan UKM agribisnis dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sehingga UKM agribisnis dapat berkembang dan menambah kemandirian berusaha.

Dalam pemberdayaan UKM agribisnis ini khususnya dalam hal pembinaan terhadap UKM agribisnis memang telah dilakukan penyuluhan dan pelatihan akan tetapi penyuluhan dan pelatihan tersebut belum mampu meningkatkan kemandirian para pelaku UKM agribisnis dalam menjalankan usahanya sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Sebenarnya pelatihan dan penyuluhan itu sudah dilaksanakan secara periodik selama empat kali pertahun, tapi penyuluhan tersebut belum bisa dijangkau oleh semua UKM agribisnis yang ada soalnya belum semua UKM agribisnis tahu manfaat dari penyuluhan dan pelatihan yang kita selenggarakan.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Dari penuturan Ibu Enny diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya para pengusaha UKM agribisnis tidak mengeluh terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UKM agribisnis akan tetapi kesalahan terjadi pada para pengusaha UKM sendiri. Mereka pada umumnya kurang mengetahui

pentingnya suatu penyuluhan dan pelatihan. Oleh karena itu, pihak Dinas Koperasi dan UMKM mengambil langkah dengan terjun langsung ke sentra-sentra agribisnis untuk memberikan penyuluhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Olfa Baskarani, S. Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“Jika ada laporan dari pihak pengusaha UKM agribisnis yang butuh penyuluhan kemudian kita datang dan kita berikan pengarahan dan solusi mengenai masalah yang dihadapi UKM agribisnis tersebut.”
(Wawancara, 25 Mei 2009)

Selain itu juga Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM menambahkan:

“Ya kadang kita ngalah juga, kita kemudian turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan karena kadang walaupun penyuluhan sudah dilaksanakan mereka tetap mengeluh kesulitan menjalankan usahanya.”
(Wawancara, 25 Mei 2009)

Dalam proses pemberdayaan, UKM agribisnis harus menjalani proses pemberdayaan yang cukup panjang dan dalam jangka waktu tersebut UKM agribisnis diharuskan untuk tetap melaporkan perkembangannya secara teratur. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Suhartini, S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan:

“Untuk sementara ini belum ada keluhan tentang kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tetapi keluhan banyak dikarenakan susah modal, sulitnya pemasaran produk, SDM pelaku agribisnis yang rendah dan lainnya.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa keluhan dari masyarakat bukan karena penyuluhan dan pelatihan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang, tetapi keluhan datang dari para pengusaha UKM agribisnis sendiri. Mereka mengeluhkan karena susah untuk mencari modal, susah

memasarkan produk, susahny menjalin kemitraan, dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan penyuluhan dan pelatihan agar mudah mencari modal dan menjalin kemitraan dengan mecarikan mitra, yaitu dengan lembaga perbankan.dengan terjalinnya hubungan antara pihak UKM agribisnis dengan lembaga perbankan itu diharapkan masalah permodalan yang dihadapi oleh UKM agribisnis dapat teratasi.

Tabel III.3 Jenis Pelatihan dan Penyuluhan UKM agribisnis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Tahun 2008

No	Jenis Pelatihan dan Penyuluhan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Penyuluhan Permodalan	8 Mei 2008	25 UKM
2	Penyuluhan Kemitraan	15 Juli 2008	21 UKM
3	Penyuluhan Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Mutu Produksi	11 September 2008	5 UKM
4	Pelatihan SDM Agribisnis	13 November 2008	36 UKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang

Selain itu pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang juga melakukan proses monitoring. Prosis monitoring adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan terus menerus, untuk dapat segera mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, supaya dapat dilakukan tindakan perbaikan segera. Hal ini menjaga agar proses

pemberdayaan UKM agribisnis dapat dipantau secara terus menerus. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Olfa Baskarani, S. Sos selaku staf seksi kemitraan:

“Proses monitoring dilakukan dengan misalnya UKM Agribisnis yang butuh modal kita arahkan untuk bekerjasama dengan bank, kemudian UKM agribisnis itu sendiri diberi penyuluhan secara berkala untuk mengetahui perkembangannya.”(Wawancara, 28 Mei 2009)

Dengan proses monitoring ini maka UKM agribisnis dapat diawasi secara berkelanjutan sehingga apabila ada indikasi dari UKM agribisnis mengalami masalah dapat segera diketahui oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM untuk segera dicarikan solusi kembali. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM:

“Kita punya agenda penyuluhan dan pelatihan, tiap beberapa bulan kita cek lagi kalau memang mereka tidak datang ke penyuluhan maka kita akan cari tahu mengapa kok mereka tidak ikut penyuluhan.” (Wawancara, 28 Mei 2009)

Dengan adanya monitoring, UKM agribisnis dapat dipantau apakah mereka mengikuti penyuluhan dan pelatihan atau tidak, jika memang mereka tidak mengikuti penyuluhan dalam jangka waktu tertentu maka pihak Dinas Koperasi dan UMKM yang akan mendatangi dan menanyai mereka mengapa tidak ikut penyuluhan.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa responsivitas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang cukup baik dalam upaya memberdayakan UKM agribisnis, hanya saja dari pihak pengusaha UKM agribisnis sendiri memang kurang tanggap terhadap apa yang telah disampaikan pihak Dinas Koperasi dan UMKM kepada mereka. Antusiasme pengusaha UKM agribisnis kurang karena memang sumber daya pelaku agribisnis kurang. Keluhan

dari para pengusaha UKM agribisnis bukan berasal dari kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang tetapi cenderung pada masalah permodalan, manajemen, mutu produksi, dan kemitraan.

3. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Dinas Koperasi dan UMKM dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam memberdayakan UKM, khususnya UKM agribisnis kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang adalah kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Semarang.

Pertanggungjawaban terhadap pemberdayaan UKM agribisnis di Kabupaten Semarang dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM adalah kepada Bupati Kabupaten Semarang karena Dinas Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sehingga secara otomatis pertanggungjawaban akan ditujukan kepada Bupati sebagai kepala daerah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan semuanya itu nanti juga akan sampai ke pusat karena itu termasuk program pemerintah pusat, karena UKM itu kan sektor yang paling kuat saat dihantam krisis begini.” (Wawancara, 28 Mei 2009)

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Enny dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban terhadap pemberdayaan UKM agribisnis ini cukup besar karena jumlah UKM agribisnis di Kabupaten Semarang cukup banyak sehingga perlu upaya yang lebih agar UKM agribisnis tersebut dapat berkembang dengan baik.

Dalam pertanggungjawaban ini mengacu pada pedoman nasional pelaksanaan kerja seperti diungkapkan oleh Bapak Olfa Baskarani, S.Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“Dalam laporan pertanggungjawaban ini kita mengacu pada buku pedoman, disitu nanti diterangkan mana yang harus dilaporkan pada atasan, jadi disini kita tetap berpegang pada pedoman itu.” (Wawancara, 28 Mei 2009)

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Sri Suhartini, S. Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan :

“Laporan pertanggungjawaban itu dibuat berdasarkan aturan yang ada dari Pemerintah Daerah. Anggaran pelaksanaan tugas kan dari pemda, makanya kita wajib melaporkan semua kegiatan kepada pemda.” (Wawancara, 28 Mei 2009)

Dari hasil pemberdayaan UKM agribisnis yang dilaporkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ternyata belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini uga ditegaskan oleh Ibu Enny Dwi Sudarwanti, selaku Kepala Seksi Permodalan UKM:

“Ya memang kita belum mencapai target tetapi disini kita sudah mengupayakan secara maksimal dengan keterbatasan yang kita miliki. Wilayah kerja cukup luas belum lagi banyaknya UKM dan keterbatasan personil sehingga menyulitkan kami untuk bekerja secara maksimal.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Enny dapat diketahui bahwa memang upaya dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UKM agribisnis ini belum sesuai dengan target dari pemerintah. Pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM memang bukan hanya meliputi pemberdayaan UKM agribisnis saja namun juga keseluruhan program yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini terjadi karena memang program dari Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya dalam pemberdayaan UKM agribisnis saja akan tetapi ada banyak program lain yang juga membutuhkan penanganan yang lebih sehingga sering terbentur dengan waktu, hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Sri Suhartini, S. Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan :

“Ya kita tidak bisa memfokuskan ke pemberdayaan UKM agribisnis saja soalnya program disini itu juga banyak sekali, kita saling kerjasama jika ada program yang dilaksanakan, istilahnya kita bisa saling dompleng, karena kalau tidak begitu waktu kita nggak akan cukup.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang belum menampakkan hasil yang maksimal karena hanya sepertiga dari target yang baru dapat dilaksanakan, yaitu dari 100% target yang tercapai baru 35%.

B. Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan UKM Sektor Agribisnis

Salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan UKM agribisnis adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM, pengusaha UKM agribisnis dan pihak lain yang mendukung semangat dan kemauan dari para pengusaha agribisnis untuk saling tukar menukar informasi akan memudahkan aparat Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga yang akhirnya menumbuhkan rasa kekeluargaan diantara mereka yang pada akhirnya memudahkan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan tugasnya untuk memberdayakan UKM agribisnis.

Kerjasama dari aparat Dinas Koperasi dan UMKM terutama pada bidang UKM yang terbagi menjadi 2, yaitu seksi permodalan dan seksi kemitraan, dimana tiap seksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menyelesaikan tugas dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, mereka juga tetap bekerjasama dan saling berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas mereka.

Selain itu, kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dalam upaya pemberdayaan UKM agribisnis ini sangat mendukung. Kerjasama ini diperlukan agar kegiatan pemberdayaan bisa dirasakan manfaatnya oleh pengusaha agribisnis. Kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan beberapa pihak khususnya dalam pemberdayaan UKM agribisnis antara lain :

1. BAPPEDA, dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan yang mendukung pemberdayaan UKM agribisnis.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, selain membantu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pengusaha agribisnis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga membantu dalam proses pengolahan serta pemasaran produk agribisnis.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan pengusaha UKM agribisnis dalam mengelola usahanya.
4. Bank, membantu dalam hal penyalur dana pinjaman modal.
5. Lembaga teknik, dalam hal memperkenalkan teknologi dan peralatan produksi yang lebih efisien.
6. UKM agribisnis yang sudah berhasil, membantu menularkan pengalaman dan ilmunya sehingga sampai bisa berhasil dalam menjalankan usahanya.

Hal ini sesuai wawancara dengan Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MM selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Selama ini kami telah menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa pihak untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam memberdayakan UKM agribisnis seperti, Diperindag, Disnakertrans, Bank, LSM, maupun pihak lainnya.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Bambang, seorang pengusaha industri tahu tempe di Ambarawa sebagai berikut:

“Selain pada Dinas Koperasi kalau usaha saya mengalami masalah, kadang-kadang saya datang ke Diperindag untuk mencari solusi.” (Wawancara, 30 Mei 2009)

Dengan adanya faktor pendukung yakni kerjasama yang baik maka diharapkan pemberdayaan UKM agribisnis dapat dilaksanakan secara maksimal

sehingga pengusaha agribisnis akan dapat mengembangkan usahanya secara mandiri.

C. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan UKM Agribisnis

Disamping faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat dalam pemberdayaan UKM agribisnis. Faktor-faktor penghambat yang ditemui di lapangan dibedakan menjadi beberapa masalah. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Keterbatasan jumlah aparat Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi yang mempunyai wewenang dalam membina dan mengembangkan UKM khususnya UKM agribisnis, diharapkan dapat menjalankan tugas lebih maksimal. Namun dalam kenyataannya masih ada berbagai masalah yang melingkupi, yakni masalah keterbatasan aparat dari Dinas Koperasi dan UMKM. Keterbatasan ini khususnya untuk aparat yang melakukan sosialisasi mengenai akan diadakannya pelatihan sementara UKM agribisnis yang ada cukup banyak dan tidak hanya terdapat di sentra ambarawa saja. Dinas tentu saja juga tidak hanya memperhatikan UKM agribisnis saja tetapi aparat-aparat lain juga dikerahkan untuk UKM-UKM yang lain yang tentu saja juga membutuhkan perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penanggungjawab. Hal ini sesuai wawancara dengan Ibu Sri Suhartini, S.Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan sebagai berikut:

“Kita masih merasa kesulitan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan untuk UKM agribisnis, karena jumlah personil kita terbatas sedangkan jumlah UKM agribisnis cukup banyak dan personil kita

juga tidak hanya memperhatikan UKM agribisnis saja, UKM yang lain juga butuh diperhatikan.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Sesuai juga dengan yang diutarakan oleh Bapak Olfa Baskarani, S.Sos selaku staf seksi kemitraan sebagai berikut:

“Kalau ada kegiatan pameran, saya dan staf lain cukup repot mensosialisasikan. Soalnya pameran kan tidak cuma pameran agribisnis saja tapi juga seluruh UKM. Jadi kami harus bagi tugas padahal personil UKM hanya 6. Biasanya sering dibantu staf dari koperasi juga.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Aparat Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pihak yang mempunyai tugas untuk memberdayakan UKM termasuk didalamnya UKM agribisnis masih terbatas keberadaannya. Sementara untuk menambah personil masih mengalami kesulitan karena masalah keterbatasan keuangan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, masalah ini harus dapat diatasi agar pemberdayaan UKM agribisnis khususnya dapat lebih maksimal.

2. Anggaran

Anggaran untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan UKM agribisnis khususnya untuk pelatihan dan penyuluhan memang sangat diperlukan. Namun anggaran untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan tersebut masih terbatas. Untuk saat ini Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan anggaran dari Pemerintah Daerah serta swadaya dari pihak-pihak lain untuk membiayai kegiatan pelatihan dan penyuluhan tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Sri Suhartini, S. Sos selaku Kepala Seksi Kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

“Untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada UKM agribisnis khususnya, kami masih kekurangan dana karena anggaran Pemda sangat terbatas, kan tidak cuma UKM saja yang butuh penyuluhan, koperasi juga butuh penyuluhan. Jadi, kita harus bagi-bagi dan harus pinter-pinter nyari sponsor biar kegiatan penyuluhan tetap jalan.” (Wawancara, 25 Mei 2009)

Keterbatasan anggaran ini telah menjadi masalah tersendiri, khususnya bagi pemberdayaan UKM agribisnis. Namun, dapat disimpulkan bahwa walaupun ada keterbatasan tetapi semangat dari aparat Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan UKM agribisnis masih besar.

3. Sarana dan prasarana penunjang

Sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan UKM agribisnis memang sangat diperlukan. Namun, sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan pemberdayaan itu masih terbatas transportasi. Transportasi sangat diperlukan bagi kegiatan pelatihan dan penyuluhan, terlebih jika pelatihan dan penyuluhan tersebut dilakukan di daerah yang sulit dijangkau. Untuk saat ini dalam mengadakan pelatihan dan penyuluhan Dinas Koperasi dan UMKM masih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini sesuai wawancara dengan Ibu Enny Dwi Sudarwanti, SH, MH selaku Kepala Seksi Permodalan UKM sebagai berikut:

“Untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan kami seringkali masih menggunakan akses kendaraan pribadi, karena memang untuk kendaraan dinas sangat terbatas dan mungkin saja digunakan untuk kegiatan lain. Meskipun begitu kami tetap menjalankan tugas dengan baik.” (Wawancara, 25 Mei 2009).

Keterbatasan sarana prasana penunjang ini tidak menghambat kewajiban Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu dan selalu

mendukung para pengusaha agribisnis baik dalam keadaan baik atau buruk. Dengan menjalankan tugas melalui program-program yang ada, serta selalu kreatif dan berinovasi dalam memberdayakan UKM agribisnis, maka para pengusaha UKM agribisnis dapat bertahan dan mampu berdiri secara mandiri.

Tabel III.5 Matriks Hasil Penelitian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang Dalam Pemberdayaan UKM Sektor Agribisnis

No	Variabel / Indikator	Uraian
1	Kinerja	Secara umum kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari indikator kinerja yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.
	- Produktivitas	Produktivitas yang dihasilkan masih rendah, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang belum mampu memenuhi target yang ditetapkan meski mereka menyatakan bahwa telah berusaha seoptimal mungkin.
	- Responsivitas	Responsivitas sudah berjalan sesuai dengan harapan. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang selalu tanggap dalam mengatasi keluhan, tuntutan, dan aspirasi pengusaha UKM agribisnis. Keluhan bukan pada kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang namun cenderung pada masalah modal, manajemen, mutu produksi, dan kemitraan.
	- Akuntabilitas	Akuntabilitas Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang belum menampakkan hasil yang maksimal. Hal ini diketahui dari hasil program pemberdayaan yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.
2	Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan UKM agribisnis	Adanya kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dengan beberapa pihak yang terkait dengan pemberdayaan UKM agribisnis, antara lain BAPPEDA, Disnakertrans, Diperindag, Bank, Lembaga Teknik, dan UKM agribisnis yang telah berhasil.
3	Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan UKM agribisnis	Keterbatasan jumlah aparat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan sarana dan prasarana menghambat kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam memberdayakan UKM agribisnis tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor yang dianggap mampu menjadi penggerak jalannya pembangunan. Selain itu juga sebagai sektor yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat serta menyerap banyak tenaga kerja, sehingga keberadaannya harus terus dikembangkan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM sebagai instansi yang memegang tanggungjawab dibidang koperasi dan UKM terus melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan koperasi dan UKM di daerahnya.

Salah satu UKM yang memiliki potensi adalah UKM agribisnis. Di Kabupaten Semarang UKM ini telah berkembang dengan baik, namun masih membutuhkan bimbingan dan arahan. Dinas Koperasi dan UMKM selalu berupaya untuk memberdayakan UKM agribisnis tersebut salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan kinerjanya, upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam memberdayakan UKM agribisnis adalah dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan baik di bidang manajemen, permodalan, dan kemitraan serta mengikutsertakan UKM-UKM agribisnis dalam suatu pameran.

Perkembangan UKM agribisnis di Kabupaten Semarang setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik jumlah pengusaha

maupun jumlah tenaga kerjanya. Untuk mengetahui berapa banyak pengusaha UKM agribisnis tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendataan dengan menyebarkan profil yang kemudian diisi oleh pengusaha UKM agribisnis.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM, terutama UKM agribisnis, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang telah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun hasilnya belum memenuhi target dari pemerintah. Dari jumlah keseluruhan UKM agribisnis yang ada, baru sekitar 35% dari jumlah tersebut yang tersentuh dan baru 5% dari jumlah tadi telah dibina. Dalam mendata jumlah UKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang menggunakan metode jemput bola dan menunggu. Metode jemput bola dilaksanakan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan lewat pameran dan penyuluhan di sentra-sentra agribisnis. Sedangkan metode menunggu yaitu para pengusaha UKM agribisnis datang sendiri untuk memberikan profil usahanya untuk didata untuk kemudian dimasukkan pada daftar pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM. Kurangnya antusiasme para pelaku UKM Agribisnis memicu munculnya hambatan dalam proses pendataan ini.

Kegiatan pemberdayaan melalui penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan dengan mendatangi sentra-sentra agribisnis yang ada di Kabupaten Semarang. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini diharapkan dapat saling tukar informasi tentang permasalahan yang dihadapi pengusaha UKM agribisnis dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga

mengikutsertakan para pengusaha UKM agribisnis dalam kegiatan pameran. Hal ini diharapkan untuk memperkenalkan produk mereka dan nantinya diharapkan akan mampu memperluas pasar produk tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi para pengusaha agribisnis diantaranya adalah semakin luasnya pasar, kemudahan mencari modal, bertambahnya omset dan tenaga kerja, serta menambah kemandirian berusaha.

Produktivitas Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam memberdayakan UKM agribisnis sudah cukup bagus, namun hasilnya belum optimal karena belum mencapai target dari pemerintah. Hasil yang dicapai baru sepertiga dari target yang ditetapkan.

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang belum mampu meningkatkan kemandirian para pelaku UKM agribisnis untuk menjalankan usahanya. Para pengusaha UKM agribisnis tersebut tidak mengeluh pada kinerja Dinas Koperasi dan UMKM, namun umumnya kesalahan terjadi pada diri pengusaha UKM agribisnis sendiri. Mereka kurang mengetahui manfaat penyuluhan dan pelatihan, oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan.

Keluhan yang sering dirasakan oleh para pelaku UKM agribisnis adalah masalah modal, pemasaran produk, masalah kemitraan, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan satker terkait untuk mengusahakan solusi guna mengatasi masalah-masalah tadi.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang juga melakukan proses monitoring. Proses monitoring dilaksanakan secara berkala dan terus menerus untuk dapat mendeteksi bila timbul masalah sehingga dapat segera diatasi. Dari proses monitoring, UKM agribisnis dapat dipantau perkembangannya.

Responsivitas Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UKM agribisnis sudah cukup baik, hanya saja pihak pengusaha UKM agribisnis kurang tanggap dengan program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM. Keluhan yang muncul tidak berasal dari kinerja Dinas Koperasi dan UMKM, namun muncul dari masalah permodalan, manajemen, mutu produksi, dan kemitraan.

Masalah-masalah mengenai permodalan dan kemitraan biasanya oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dicarikan solusi, yaitu dengan mencarikan mitra. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM berperan sebagai perantara dan mitra yang dimaksud adalah lembaga perbankan.

Akuntabilitas Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM agribisnis memang sudah menampakkan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Semarang selaku kepala daerah. Hasil pemberdayaan UKM agribisnis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ternyata telah dilaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk laporan dinas. Pelaksanaan pemberdayaan UKM Agribisnis telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan suatu kekhawatiran dari pihak UKM

terhadap akuntabilitas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang. Pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya meliputi pemberdayaan UKM agribisnis saja, namun juga mencakup seluruh program yang ada yang juga membutuhkan penanganan sehingga sering berbenturan waktu dan tenaga.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung antara lain terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pengusaha UKM agribisnis, Dinas Koperasi dan UMKM dan pihak pendukung, seperti Diperindag, Disnakertrans, Bank, Lembaga Teknik, dan lainnya. Beberapa hambatan juga ditemui yaitu keterbatasan jumlah aparat Dinas Koperasi dan UMKM, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang. Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UKM agribisnis.

B. SARAN

Dalam kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang, maka penulis memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait:

1. Penambahan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pemberdayaan UKM agribisnis oleh Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya diadakan penambahan sarana dan prasarana yang terasa masih kurang terutama masalah kendaraan bermotor,

baik sepeda motor maupun mobil. Apalagi kendaraan bermotor tersebut merupakan sarana yang cukup vital dalam pelaksanaan tugas aparat Dinas Koperasi dan UMKM terutama ketika akan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan. Mobil yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM saat ini ada 2 unit dan penggunaannya harus bergantian dengan bidang lain. Untuk itu alangkah lebih baik bila menambah paling tidak 1 unit mobil lagi agar kegiatan pemberdayaan menjadi semakin lancar.

2. Mengadakan Kegiatan Pameran Khusus untuk UKM Agribisnis saja

Hendaknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang lebih sering mengadakan kegiatan pameran khusus untuk UKM agribisnis saja, karena selama ini kegiatan pameran yang diadakan merupakan pameran yang diikuti oleh berbagai macam UKM.

Apabila kegiatan pameran khusus agribisnis lebih sering diadakan maka besar kemungkinan produk UKM agribisnis akan semakin dikenal luas baik di Kabupaten Semarang sendiri maupun di luar daerah Kabupaten Semarang. Sehingga kesempatan untuk membuka daerah persebaran pemasaran produk menjadi semakin luas.

3. Menambah Kegiatan Maupun Program untuk Usaha Pengembangan dan Pemberdayaan UKM Agribisnis

Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan UKM agribisnis selama ini hanya mencakup kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pameran saja. Masih dibutuhkan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberdayakan UKM agribisnis.

Untuk itu hendaknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang menambah program-program baru untuk segera dilaksanakan. Salah satunya dengan membentuk dan mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi. Dengan demikian daerah pemasaran UKM agribisnis akan semakin mudah didapat karena telah memiliki akses pemasaran tersendiri sehingga para pengusaha agribisnis tidak terlalu kesulitan untuk memasarkan produknya. Dengan harapan usaha mereka nantinya menjadi semakin berkembang dan mandiri. Selain itu, program-program baru diharapkan dapat meningkatkan antusiasme para pelaku UKM Agribisnis untuk mengikuti kegiatan pembinaan UKM.

4. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan UKM agribisnis telah membawa hasil yang bagus walaupun pelaksanaannya belum maksimal. Namun alangkah lebih baik apabila Dinas Koperasi dan UMKM mengupayakan program-program baru atau kegiatan-kegiatan lain yang mampu menunjang kinerjanya dalam memberdayakan UKM agribisnis.

Hal ini bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan-perusahaan besar dengan sistem kemitraan bagi pengusaha agribisnis. Perusahaan besar tersebut seperti pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal dan lainnya. Jadi, pengusaha agribisnis bisa memasukkan produknya ke pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Dengan demikian selain memperluas daerah pemasaran dan meningkatkan jumlah

pendapatan, para pengusaha agribisnis juga dituntut untuk dapat menjaga mutu produknya agar tetap dapat bersaing dipasaran.

Selain kerjasama dengan pihak swasta, Dinas Koperasi dan UMKM tentu saja bisa juga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang selain terdapat sentra UKM agribisnis yang juga memiliki berbagai macam objek wisata. Dengan konsep wisata yang ditawarkan dapat mengarah pada wisata belanja, dengan demikian diharapkan produk agribisnis Kabupaten Semarang akan semakin dikenal dan meningkatkan perluasan pasar yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku agribisnis dan tentu saja meningkatkan pendapatan daerah.

Semoga saran-saran tersebut bisa menjadi masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengembangkan dan memberdayakan UKM. Baik UKM agribisnis maupun UKM-UKM yang lain. Sehingga diharapkan kemandirian usaha dari UKM dapat tercapai dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pertumbuhan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta : CIDES.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abdul Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dkk. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia.

SUMBER LAIN :

1. Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang.
2. Supami. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata*. Skripsi. Surakarta : FISIP UNS.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. www.wikipedia.com

JURNAL INTERNASIONAL :

Brophy, Peter. 2008. www.emerald.com. *Performance Measurement and Metrics*.

The international journal for library and information services : Volume 9.

Greiling, Dorothea. 2009. www.emerald.com. *Performance Measurement : a remedy for increasing the efficiency of public services?*. International Journal of Productivity and Performance Management. Emerald : Volume 55.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Semarang

A. Produktivitas

1. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang terkait dengan pemberdayaan UKM sektor agribisnis?
2. Kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM sektor agribisnis?
3. Apakah kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik?
4. Apa kegiatan tersebut telah mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan?
5. Seberapa jauh target Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM sektor agribisnis?
6. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM sektor agribisnis?

B. Responsivitas

1. Bagaimana kemampuan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam mengetahui kebutuhan dan aspirasi para pengusaha UKM agribisnis?
2. Bagaimana cara pendataan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah UKM dan kebutuhan UKM tersebut?
3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang mempunyai saluran komunikasi yang menghubungkan antara kantor dinas dengan pengusaha UKM agribisnis?
4. Jika ada, bagaimana mekanisme penggunaannya?
5. Apakah ada keluhan dari pengusaha UKM agribisnis terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM, jika iya bagaimana sikap Dinas Koperasi dan UMKM menanggapi dan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi keluhan tersebut?

C. Akuntabilitas

1. Apa saja yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang?
2. Kepada siapa pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang mempertanggungjawabkan kinerjanya?
3. Seberapa jauh pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang dalam pemberdayaan UKM terutama pada sektor agribisnis?
4. Upaya apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang ketika menemui UKM yang mengalami kesulitan dalam usahanya?
5. Upaya apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Semarang jika ada UKM yang ingin menghentikan usahanya setelah dilakukan pembinaan?

2. Pelaku UKM Agribisnis

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan UKM Agribisnis?
2. Apakah hasil kegiatan tersebut sudah dapat dirasakan?
3. Apakah anda mengetahui setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?
4. Apakah informasi mengenai kegiatan dapat anda ketahui dengan mudah?
5. Apakah aspirasi anda telah terpenuhi?
6. Apakah keluhan anda telah ditanggapi dengan baik?
7. Menurut anda, apakah pihak Dinas Koperasi dan UMKM selama ini telah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya?